



**PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA DALAM
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN
PELANGGARAN BERSIFAT MENDESAK**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Hukum**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
2023**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Siti Rohmah
NIM : 2110622070
Tanggal : 12 Juli 2023

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juli 2023

Yang menyatakan,



(Siti Rohmah, S.H.I.)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Rohmah
NIM : 2110622070
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu penerahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive Royalty Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Perlindungan Hak Konstitusional Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Pelanggaran Bersifat Mendesak**

Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Juli 2023

Yang Menyatakan



(Siti Rohmah, S.H.I.)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM

Jalan RS. Fatmawati No. 1 Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 Telp. 021-7656971, Fax. 021-7656904
Website: <http://www.upnvj.ac.id>, Email: upnvj@upnvj.ac.id

TESIS

**PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA
DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN
ALASAN PELANGGARAN BERSIFAT MENDESAK**

Siti Rohmah

2110622070

Telah disetujui untuk Ujian Tesis

Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
Pembimbing

Jakarta, 10 Juli 2023

Mengesahkan,

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes.
NIP 199304282022031009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM

Jalan RS. Fatmawati No. 1 Pondok Labu Jakarta Selatan 12450 Telp. 021-7656971, Fax. 021-7656904
Website: <http://www.upnvj.ac.id>, Email: upnvj@upnvj.ac.id

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh:

Nama : Siti Rohmah
NRP : 2110622070
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : Perindungan Hak Konstitusional Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja
Dengan Alasan Pelanggaran Bersifat Mendesak

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.
Ketua Penguji

Dr. Ahmad Ahsin Thohari, S.H., M.H.
Penguji I

Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
Penguji II/ Pembimbing



Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H. M.Tr.Adm.Kes.
Kaprosdi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 20-07-2023

**PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA DALAM PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PELANGGARAN BERSIFAT
MENDESAK**

SITI ROHMAH

Abstrak

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja mengatur mengenai pemutusan hubungan kerja dengan alasan pelanggaran bersifat mendesak Alasan pemutusan hubungan kerja ini secara substansi sama dengan pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 012/PUU-I/2003 karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya jaminan atas hak atas pekerjaan dan bekerja secara adil dan layak sebagai bagian dari bentuk hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan guna menjawab permasalahan hukum yaitu bagaimana keberlakuan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pelanggaran bersifat mendesak dalam kaitannya pula dengan keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 dan 91/PUU-XVIII/2020. Dari penelitian yang telah dilakukan didapat kesimpulan yaitu ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dengan alasan pelanggaran bersifat mendesak merupakan bentuk dari dihidupkannya kembali alasan pemutusan hubungan kerja yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dan oleh karena berpotensi untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Demi terwujudnya asas negara hukum, maka aturan mengenai pemutusan hubungan kerja dengan alasan pelanggaran bersifat mendesak sangat patut untuk dicabut.

Kata Kunci: pemutusan hubungan kerja; alasan mendesak; konstitusionalitas

**PROTECTION OF WORKERS' CONSTITUTIONAL RIGHTS IN TERMINATION OF
EMPLOYMENT RELATIONSHIP WITH URGENT BREACH OF VIOLATION**

SITI ROHMAH

Abstract

Government Regulation Number 35 of 2021 Concerning Work Agreements for a Specific Time, Outsourcing, Working Time Break Time, Termination of Employment regulates termination of employment on grounds of urgent violation Reasons for termination of employment This is substantially the same as termination of employment on the grounds of serious misconduct in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which was canceled by the Constitutional Court through Decision Number 012/PUU-I/2003 because it contradicts the 1945 Constitution, especially guarantees for the right to work and work fairly and decently as part of human rights. This research is a legal research conducted using a statutory approach to answer legal issues, namely how the enforceability of termination of employment on the grounds of an urgent violation is also related to the existence of Constitutional Court Decisions Number 012/PUU-I/2003 and 91/PUU-XVIII /2020. From the research that has been done, it can be concluded that the provision regarding termination of employment for reasons of urgent violation is a form of reviving reasons for termination of employment which had previously been declared unconstitutional by the Constitutional Court and therefore has the potential to be declared contrary to the 1945 Constitution. the realization of the principle of rule of law, the rules regarding termination of employment with reasons of urgent violations really deserve to be repealed.

Keywords: *Work termination; urgent reasons; constitutionality*


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Perlindungan Hak Konstitusional Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Bersifat Mendesak”.

Penulis menyadari bahwa terselesainya tesis ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Anter Venus, MA., Comm., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2. Dr. Suherman, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
3. Dr. Handar S.B., S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah sabar membimbing dan memberikan semangat
4. Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan arahan dalam penyusunan tesis ini
5. Orangtua Penulis, Bapak H. Yusuf Ismail, Umi Hj. Nani Suryanih, Mamah Hj. Enny Daniarti, Papah M. Fidiyantoro, suami M. Fandrian Hadistianto, anak Malika Adzra Hadistianto, Nizami Atharizki Hadistianto dan Maheera Ghea Hadistianto, dan kakak-kakak serta adik-adik penulis, yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang kepada penulis
6. Rekan-rekan penulis Rumah Perempuan dan Anak, Pusat Kajian Kebijakan dan Advokasi Perburuhan, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyusunan aktualisasi.

Jakarta, 22 Juli 2023


(Siti Rohmah, S.H.I.)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Kerangka Teoritis	6
1.5.1. Teori Perlindungan Hukum	7
1.5.2. Teori Hak Konstitusional Pekerja	8
1.5.3. Teori Kaidah Heteronom Ketenagakerjaan	8
1.6. Kerangka Konseptual	10
1.7. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Sifat dan Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan	14
2.2. Pemutusan Hubungan Kerja	16
2.2.1. Prinsip Utama Pemutusan Hubungan Kerja	17
2.2.2. Tahapan Pemutusan Hubungan Kerja	18
2.2.3. Alasan Pemutusan Hubungan Kerja	21
2.2.4. Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja	35
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1. Jenis Penelitian	48
3.2. Pendekatan Penelitian	49
3.3. Spesifikasi Penelitian	49
3.4. Analisis Penelitian	50
3.5. Sumber Bahan Hukum	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1. Keberlakuan Hukum Aturan Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Pelanggaran Bersifat Mendesak	52
4.1.1. Kesamaan Substansi Dengan Kesalahan Berat Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja	52
4.1.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Dan Implikasinya Terhadap Keberlakuan Hukum Aturan Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Mendesak	58
4.1.3. Dihidupkannya Kembali Aturan Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Mendesak	63

4.2.	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Pelanggaran Bersifat Mendesak	64
4.2.1.	Tahapan Pemutusan Hubungan Kerja	65
4.2.2.	Alasan Pemutusan Hubungan Kerja	67
4.2.3.	Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja	71
BAB V	PENUTUP	73
5.1.	Kesimpulan	73
5.2.	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komponen Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	36
Tabel 2	Kesamaan Substansi Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Bersifat Mendesak Dan Kesalahan Berat.....	67